

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KOTA DI SUMATERA BARAT

Oleh: Hasdi Aimon dan Rova Luarta Putra

ABSTRACT

The study explained the effects of the original income of region on economic growth; and equilibrium funds (general allocation funds and special allocation funds) on regencies and city economic growth in West Sumatera. The type of research is the study causative. The data was conducted in 12th regencies and 7th cities in West Sumatra and time series 2009 to 2013. The analysis used Regression Panel Model (Pooled Analysis). The result show that the original income of region and general allocation funds significantly effect on economic growth, but Special allocation funds had no significant effect with the negative direction on regencies and city economic growth in West Sumatera. It's recommended that the Government is explored to the sources of revenues primarily to revenue (original income of region) because it's a major source of financing that will to increase the economic growth of a region. Besides that, districts and cities in West Sumatra so much attention to the use of these funds, so that the assistance provided by the central government targeted and appropriate objectives was boost economic growth in each region.

Keyword: Original income of region, Equilibrium funds, and Economic growth.

A. Pendahuluan

Kinerja perekonomian suatu daerah dikatakan baik ditentukan oleh salah satu indikator makroekonomi dalam melaksanakan pembangunan daerah tersebut ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah atau negara dalam suatu periode tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan output yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berada di daerah atau regional tertentu. PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi daerah, memuat berbagai instrumen ekonomi yang didalamnya terlihat dengan jelas keadaan makroekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota
di Sumatera Barat dari Tahun 2009 – 2013.

NO	NAMA DAERAH	Laju Pertumbuhan				rata-rata
		2010	2011	2012	2013	
	A. Kabupaten					
1	Kab. Agam	5,7%	5,2%	6,8%	6,4%	6,0%
2	Kab. Dharmasraya	10,7%	3,3%	6,0%	4,0%	6,0%
3	Kab. Pasaman Barat	6,7%	6,4%	6,5%	6,5%	6,5%
4	Kab. Solok Selatan	6,7%	9,4%	-23,9%	6,4%	-0,3%
5	Kab. Limapuluh Kota	4,5%	5,0%	5,2%	5,0%	4,9%
6	Kab. Solok	6,3%	6,0%	6,3%	6,3%	6,2%
7	Kab. Pasaman	7,6%	9,9%	9,2%	9,2%	9,0%
8	Kab. Sijunjung	5,9%	6,0%	6,0%	6,1%	6,0%
9	Kab. Padang Pariaman	3,8%	4,5%	5,4%	6,7%	5,1%
10	Kab. Tanah Datar	5,3%	5,5%	5,2%	5,5%	5,4%
11	Kab. Pesisir Selatan	4,3%	4,2%	4,0%	5,7%	4,6%
12	Kab. Kep Mentawai	3,5%	1,6%	2,7%	3,2%	2,8%
	Rata-rata Kabupaten	5,9%	5,6%	3,3%	5,9%	5,2%
	B. Kota					
13	Kota Payakumbuh	4,4%	-2,5%	5,9%	3,4%	2,8%
14	Kota Padang	4,6%	4,8%	5,8%	3,7%	4,7%
15	Kota Bukit Tinggi	2,5%	3,8%	4,4%	4,3%	3,7%
16	Kota Solok	-0,1%	4,8%	4,5%	6,4%	3,9%
17	Kota Padang Panjang	4,1%	4,5%	4,8%	4,6%	4,6%
18	Kota Pariaman	3,6%	4,6%	4,7%	4,7%	4,4%
19	Kota Sawahlunto	5,4%	3,9%	-2,5%	18,1%	6,2%
	Rata-rata Kota	5,3%	3,4%	3,9%	6,4%	4,5%

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sumatera Barat.

Tabel 1 di atas memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota di provinsi Sumatera Barat cenderung berfluktuasi. Apabila dilihat dari rata-rata laju pertumbuhan ekonominya, rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu sebesar 5,2%. Meskipun rata-rata pertumbuhan ekonominya sebesar 5,2% bukan berarti semua kabupaten di Sumatera Barat mampu memperoleh rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar tersebut. Terdapat beberapa daerah yang rata-rata laju pertumbuhan ekonominya berada dibawah nilai rata-rata laju pertumbuhan kabupaten yaitu Kab. Kepulauan Mentawai dan kab. Solok Selatan.

Faktor yang menyebabkan terjadi perbedaan laju pertumbuhan antar kabupaten yaitu karena secara individu setiap daerah memiliki potensi sumber

daya yang berbeda-beda. Artinya kabupaten yang memiliki sumber daya yang melimpah tentu akan mampu memperoleh laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sementara kabupaten yang memiliki sumber daya yang terbatas atau sedikit terutama kab. Kep Mentawai dan kab. Solok Selatan maka akan memperoleh laju pertumbuhan ekonomi yang rendah pula.

Selain itu, perkembangan pertumbuhan ekonomi kota dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Fenomena memperlihatkan bahwa secara rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kota yaitu sebesar 4,5%. Kota yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu kota Padang. Dimana kota Padang merupakan Pusat kota Sumatera Barat yang memiliki sumber pendapatan yang tinggi sehingga laju pertumbuhan ekonomi yang akan diperoleh menjadi tinggi pula.

Kondisi tersebut, dapat dicermati bahwa antara kabupaten dan kota, dilihat dari pertumbuhan ekonominya mengindikasikan adanya ketimpangan antara kabupaten dan kota. Secara umum ketimpangan tersebut disebabkan oleh besarnya sumberdaya dan pendapatan yang dimiliki oleh suatu daerah. Pendapatan suatu daerah besumber dari diantaranya yaitu Pendapata Asli Daerah Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Besarnya PAD yang di peroleh oleh suatu daerah juga menentukan besarnya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Tabel 2
Laju Pertumbuhan PAD Perkapita Kabupaten dan Kota
Di Sumatera Barat Dari Tahun 2009 – 2013.

NO	NAMA DAERAH	Laju Pertumbuhan PAD				Rata-rata
		2010	2011	2012	2013	
	A. Kabupaten					
1	Kab. Agam	-16%	63%	9%	19%	18,7%
2	Kab. Dharmasraya	-1%	51%	13%	-31%	7,9%
3	Kab. Pasaman Barat	-4%	16%	13%	10%	8,9%
4	Kab. Solok Selatan	-37%	98%	47%	-3%	26,2%
5	Kab. Limapuluh Kota	49%	36%	3%	31%	29,6%
6	Kab. Solok	-22%	47%	-10%	18%	8,2%
7	Kab. Pasaman	6%	58%	27%	-1%	22,5%
8	Kab. Sijunjung	-13%	26%	15%	12%	10,1%
9	Kab. Padang Pariaman	8%	9%	15%	35%	16,5%
10	Kab. Tanah Datar	0%	39%	46%	-16%	17,4%
11	Kab. Pesisir Selatan	151%	-1%	17%	-1%	41,5%
12	Kab. Kep Mentawai	-12%	1%	28%	-13%	0,9%
	Rata-rata Kabupaten	9%	37%	19%	5%	17%
	B. Kota					

13	Kota Payakumbuh	3%	20%	12%	4%	9,7%
14	Kota Padang	39%	-1%	25%	23%	21,4%
15	Kota Bukit Tinggi	-16%	23%	5%	18%	7,8%
16	Kota Solok	-21%	26%	-3%	0%	0,2%
17	Kota Padang Panjang	45%	10%	5%	25%	21,3%
18	Kota Pariaman	9%	13%	2%	15%	9,7%
19	Kota Sawahlunto	-14%	51%	-5%	5%	9,3%
	Rata-rata Kota	6%	20%	6%	13%	11%

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, (Diolah).

Tabel 2 di atas memperlihatkan bahwa secara rata-rata dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, rata-rata laju pertumbuhan PAD per kapita kabupaten lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan PAD per kapita kota. Namun jika di lihat dari rata-rata laju pertumbuhan ekonominya, kabupaten juga memperoleh rata-rata laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pula dibandingkan kota.

Namun demikian, apabila dilihat dari laju pertumbuhan PAD per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten dari tahun 2009 sampai dengan 2013, terlihat bahwa pada tahun 2010 ke 2011 laju pertumbuhan PAD mengalami Peningkatan sementara laju pertumbuhan ekonominya justru malah mengalami penurunan. Kemudian hal yang serupa juga terjadi pada tahun 2012 ke 2013, laju pertumbuhan PAD per kapita kabupaten menurun tetapi laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.

Sedangkan, apabila dilihat dari kota, pada tahun 2010 ke 2011 laju pertumbuhan PAD per kapita kota mengalami peningkatan sementara laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. kemudian dari tahun 2011 ke 2012 justru malah sebaliknya. Pertumbuhan PAD per kapita menurun tetapi pertumbuhan ekonomi malah mengalami peningkatan.

Secara keseluruhan baik kabupaten maupun kota belum memperlihatkan efektifitas dalam menggunakan pendapatan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sesuai *Keynesian Theory*, dimana dalam teori tersebut dijelaskan bahwa ketika pendapatan meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan. fenomena yang terjadi di kabupaten dan kota di Sumatera Barat yaitu terjadinya ketidaksesuaian antara teori dengan kenyataan.

Selain pendapatan Asli Daerah, setiap daerah baik kabupaten maupun kota memiliki sumber pendapatan lain yaitu dana perimbangan. Dana perimbangan yaitu dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan celah fiskal antar daerah. Dana perimbangan terbagi atas

tiga komponen yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan penelitian pada dua komponen dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Salah satu Tujuan pemerintah pusat memberikan bantuan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) kepada pemerintah daerah yaitu untuk merangsang pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jadi dapat dimaknai bahwa semakin besar proporsi DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka semakin besar pula pertumbuhan ekonomi yang akan diperoleh oleh suatu daerah. Untuk melihat kontribusi DAU terhadap pertumbuhan ekonomi di kab/kota di Sumatera Barat, maka di dapat dilihat dari tabel perbandingan dibawah ini :

Tabel 3
Laju Pertumbuhan DAU Per kapita Kabupaten dan Kota
Di Sumatera Barat Dari Tahun 2009 – 2013.

NO	NAMA DAERAH	Laju Pertumbuhan DAU				Rata-rata
		2010	2011	2012	2013	
	A. Kabupaten					
1	Kab. Agam	-1%	11%	20%	12%	11%
2	Kab. Dharmasraya	0%	12%	15%	7%	9%
3	Kab. Pasaman Barat	40%	23%	3%	10%	19%
4	Kab. Solok Selatan	3%	6%	18%	7%	9%
5	Kab. Limapuluh Kota	1%	12%	17%	13%	11%
6	Kab. Solok	16%	15%	8%	12%	13%
7	Kab. Pasaman	4%	11%	17%	-20%	3%
8	Kab. Sijunjung	7%	12%	16%	11%	12%
9	Kab. Padang Pariaman	2%	10%	19%	12%	11%
10	Kab. Tanah Datar	-22%	10%	69%	-27%	8%
11	Kab. Pesisir Selatan	22%	7%	6%	15%	13%
12	Kab. Kep Mentawai	-6%	11%	10%	24%	10%
	Rata-rata Kabupaten	6%	12%	18%	7%	10%
	B. Kota					
13	Kota Payakumbuh	-5%	4%	23%	10%	8%
14	Kota Padang	17%	0%	21%	12%	12%
15	Kota Bukit Tinggi	-1%	11%	18%	9%	9%
16	Kota Solok	7%	11%	17%	9%	11%

17	Kota Padang Panjang	34%	11%	11%	9%	16%
18	Kota Pariaman	-7%	10%	13%	12%	7%
19	Kota Sawahlunto	-24%	10%	18%	45%	12%
	Rata-rata Kota	3%	8%	17%	15%	11%

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, (Diolah).

Tabel 3 di atas dapat di lihat bahwa, rata-rata laju pertumbuhan DAU kabupaten dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 yaitu sebesar 10% dan laju pertumbuhan ekonominya sebesar 5,2%. Jika dilihat dari wilayah kota diperoleh rata-rata laju pertumbuhan DAU yaitu sebesar 11% dan laju pertumbuhan ekonominya sebesar 4,8%. Dari hasil perbandingan tersebut terdapat sebuah permasalahan dimana kabupaten yang memiliki laju pertumbuhan DAU yang lebih rendah dari pada laju pertumbuhan DAU kota, justru memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sementara kota yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan DAU yang tinggi justru malah mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang rendah. Seharusnya semakin besar daerah yang memiliki pertumbuhan DAU yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang akan diperoleh juga akan tinggi pula. Adanya permasalahan ini, menandai bahwa harapan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah belum memberikan hasil yang diharapkan.

Selanjutnya, apabila dilihat dari perkembangan laju pertumbuhan DAU dan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, baik pada pemerintah kabupaten maupun kota, penurunan dan kenaikan laju pertumbuhan DAU tidak memberikan arah yang positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Artinya dalam beberapa tahun terakhir tersebut ketika pertumbuhan DAU meningkat tetapi pertumbuhan ekonomi malah mengalami penurunan. permasalahan tersebut terjadi pada tahun 2010 ke 2012 dan tahun 2012 ke tahun 2013 pada pemerintah kabupaten. Hal yang serupa juga dialami oleh pemerintah kota yaitu pada tahun 2012 ke 2013.

Fenomena ini terjadi yaitu karena pemerintah pusat memberikan wewenang seutuhnya kepada pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana tersebut sehingga pemerintah daerah secara leluasa menggunakannya pada pembiayaan yang di anggap tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain Dana Alokasi Umum (DAU), pemerintah pusat juga memberikan bantuan kepada pemerintah daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan khusus suatu daerah. kegiatan khusus suatu daerah yang dimaksud yaitu untuk membiayai sarana prasarana pembangunan,

infrastruktur dan lain sebagainya. Tabel 4 berikut ini merupakan perkembangan DAK Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

Tabel 4
Laju Pertumbuhan DAK Perkapita Kabupaten dan Kota
Di Sumatera Barat Dari Tahun 2009 – 2013.

NO	NAMA DAERAH	Laju Pertumbuhan DAU				Rata-rata
		2010	2011	2012	2013	
	A. Kabupaten					
1	Kab. Agam	-4%	-12%	50%	-12%	5,5%
2	Kab. Dharmasraya	-10%	-1%	-5%	41%	6,1%
3	Kab. Pasaman Barat	-8%	-14%	19%	21%	4,6%
4	Kab. Solok Selatan	-51%	-2%	19%	31%	-0,8%
5	Kab. Limapuluh Kota	-35%	-6%	-6%	14%	-8,0%
6	Kab. Solok	9%	2%	4%	29%	11,3%
7	Kab. Pasaman	-17%	10%	7%	-33%	-8,1%
8	Kab. Sijunjung	-13%	30%	1%	55%	17,9%
9	Kab. Padang Pariaman	-21%	27%	-5%	50%	12,9%
10	Kab. Tanah Datar	1%	2%	41%	-24%	5,0%
11	Kab. Pesisir Selatan	13%	7%	0%	4%	6,1%
12	Kab. Kep Mentawai	-40%	42%	19%	31%	12,9%
	Rata-rata Kab.	-15%	7%	12%	17%	5,5%
	B. Kota					
13	Kota Payakumbuh	-70%	77%	19%	33%	14,6%
14	Kota Padang	-37%	102%	19%	24%	27,0%
15	Kota Bukit Tinggi	-33%	-5%	-13%	40%	-2,6%
16	Kota Solok	12%	3%	63%	2%	20,1%
17	Kota Padang Panjang	84%	-65%	37%	-32%	6,1%
18	Kota Pariaman	-61%	13%	22%	-86%	-28,4%
19	Kota Sawahlunto	17%	35%	-23%	47%	19,2%
	Rata-rata kota	-13%	23%	18%	4%	8%

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, (Diolah).

Tabel 4 di atas memperlihatkan bahwa dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 rata-rata laju pertumbuhan DAK kabupaten yaitu sebesar 5,5% dan rata-rata laju pertumbuhan ekonominya yaitu sebesar 5,2%. Jika di bandingkan dengan laju pertumbuhan DAK Kota. Kota memiliki rata-rata laju pertumbuhan DAK sebesar 8%, sedangkan rata-rata laju pertumbuhan ekonominya yaitu sebesar 4,8%. Hal memperlihatkan adanya permasalahan

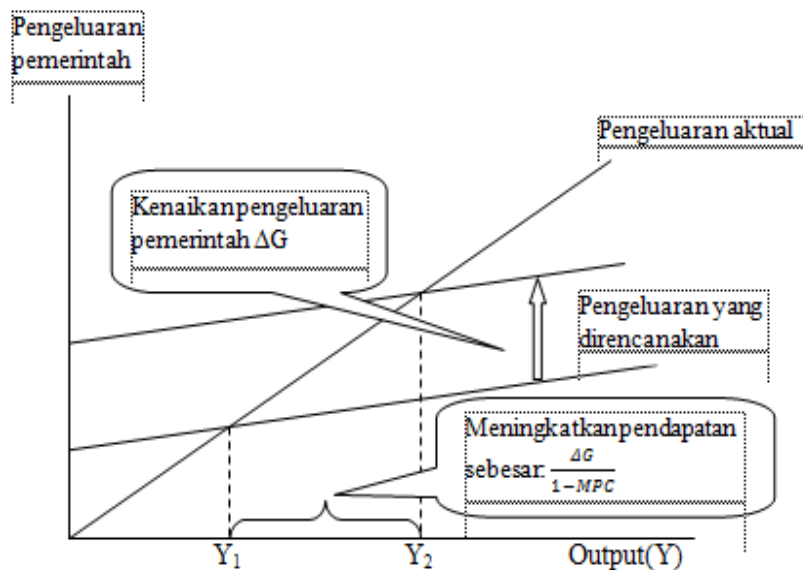
yaitu kota yang memiliki laju pertumbuhan DAK yang tinggi dari pada kabupaten tetapi memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang rendah dari pada kabupaten, demikian juga sebaliknya kabupaten yang mengalami laju pertumbuhan DAK yang rendah justru malah memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Daerah yang memiliki laju pertumbuhan DAK yang tinggi, seharusnya laju pertumbuhan ekonomi tinggi pula. Fenomena yang terjadi di kabupaten maupun kota di Sumatera Barat justru terbalik.

Apabila dicermati perkembangan laju pertumbuhan DAK dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, terlihat bahwa laju pertumbuhan DAK cenderung berfluktuasi dan tidak stabil. Hal ini ditandai dengan sebagian kabupaten dan kota memperoleh pertumbuhan DAK yang tinggi. Sedangkan sebagian kota lainnya memperoleh pertumbuhan yang rendah. Faktor yang menyebabkan ketimpangan pertumbuhan DAK antar daerah yaitu karena setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda pula. Daerah yang membutuhkan pembangunan yang cukup tinggi akan memperoleh DAK yang tinggi pula, dan begitu juga sebaliknya.

Peneliti terdahulu, diantaranya oleh Afrisa Ayu, et.al (2012), memperoleh menemukan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sementara DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap Pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Pipin Prasetyo (2011), menemukan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan DAK berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kemudian penelitian yang dilakukan Atsushi Limi (2004), memperoleh hasil bahwa Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis memberi judul artikel ini “ **ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KOTA DI SUMATERA BARAT**”.

B. Metode Penelitian

Teori makroekonomi yang menjadi landasan pemikiran penelitian ini, Mankiw (2008: 284), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan seluruh output yang dihasilkan oleh masyarakat didalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, Teori Keynesian menyatakan bahwa hubungan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi ini diilustrasikan dengan pemodelan yang disebut perpotongan Keynesian, seperti yang digambarkan di bawah ini.



Gambar 1: Perpotongan Keynesian

Kenaikan pengeluaran/ belanja pemerintah sebesar ΔG akan meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sebesar jumlah itu, maka akan meningkatkan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi dari Y_1 ke Y_2 . Jika kita memasukkan unsur daerah dalam teori keynesian ini, maka dapat di maknai bahwa pada saat pendapatan suatu daerah meningkat baik dari PAD maupun dana perimbangan, secara otomatis pengeluaran saat itu juga meningkat sehingga dengan meningkatnya pengeluaran maka pertumbuhan akan meningkat pula. Karena fungsi dari pendapatan yaitu untuk membelanjai kegiatan pembangunan suatu daerah.

Menurut Harrod-Domar dalam Mankiw (2008: 285), setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan dan material) yang rusak. Namun untuk menumbuhkan perekonomian diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Jika dianggap ada hubungan ekonomis secara langsung antara besarnya stok modal (K) dan total output (Y), maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal akan mengakibatkan kenaikan total output sesuai dengan rasio output modal tersebut.

Selanjutnya, menurut teori pertumbuhan Solow-Swan dalam Mankiw (2008: 287), pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan pada analisis klasik, bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat pekerjaan penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya

digunakan. Pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur menggunakan data produk domestik bruto (PDB) untuk skala nasional dan Produk Domestik Regional Bruto Untuk daerah (PDRB) pada nilai akhir pasar dari barang-barang akhir dan jasa-jasa yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Ahmad Yani (2008: 44), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Dana alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak terkait dengan program pengeluaran tertentu (Ahmad Yani 2008: 142). Kemudian, berdasarkan Undang-undang No.33 Tahun 2004 pengalokasian DAU ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Apabila suatu daerah memiliki potensi fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang besar tetapi kebutuhan fiskal kecil maka akan memperoleh alokasi DAU yang relative kecil. Sebaliknya untuk daerah yang potensi fiskalnya kecil dan pertumbuhan ekonomi yang kecil sedangkan kebutuhan fiskalnya besar maka akan memperoleh alokasi DAU yang relative besar (Subchan dan Sudarman, 2007).

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan tertentu (Ahmad Yani 2008: 165). DAK bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah :

- a. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus, kebutuhan yang bersifat khusus yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan dikawasan transmigrasi, dan kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan dikawasan terpencil, saluran irigasi primer dan saluran drainase primer.
- b. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau bersifat prioritas nasional, termasuk antara lain proyek yang dibiayai donor, pembiayaan reboisasi daerah dan proyek-proyek kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal. Dalam keadaan tertentu DAK dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 tahun.

Model Analisis

Data penelitian akan dianalisis dengan digunakan Model Regresi Panel, hal ini didasarkan kepada data penelitian yang terdiri data *cross section* sebanyak 12 kabupaten dan 7 kota di Provinsi Sumatera Barat dan data *time series* dalam periode 2009 sampai dengan 2013. Jadi, data yang digunakan merupakan gabungan antara data antarseksi (*cross-section*) dan data runtun waktu (*time-series*). Gabungan dari data antarseksi (*cross-section*) dan data runtun waktu (*time-series*) disebut sebagai data panel. Untuk itu, model analisis digunakan model regresi panel.

Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data Realisasi APBD tahun 2009 sampai dengan 2013 bersumber dari publikasi Direktorat Jenderal Perimbangan *Keuangan* Kementerian Keuangan. Sedangkan data Produk Domestik Regional Bruto tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik. Model analisis dapat ditulis dalam bentuk persamaan berikut ini:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \cdot X_{1it} + \beta_2 \cdot X_{2it} + \beta_3 \cdot X_{3it} + u_{it}$$

Dimana:

β_0 = konstanta;

$\beta_1 \dots \beta_3$ = koefisien variabel independen

Y_{it} = Pertumbuhan ekonomi daerah i pada periode t;

- X_{1it} = Pendapatan Asli Daerah daerah i pada periode t;
 X_{2it} = Dana Alokasi Umum daerah i pada periode t;
 X_{3it} = Dana Alokasi Khusus daerah i pada periode t;
 u_{it} = error

C. Hasil Dan Pembahasan

Hasil estimasi dari model regresi panel yang digunakan dalam penelitian ini memperlihatkan sebagai berikut ini.

Dependent Variable: Y?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 08/16/15 Time: 15:39				
Sample: 2009 2013				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 19				
Total pool (balanced) observations: 95				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5700619.	298595.2	19.09147	0.0000
X1?	4.175940	1.454650	2.870752	0.0054
X2?	0.575152	0.159472	3.606606	0.0006
X3?	-0.217643	0.647299	-0.336232	0.7377
Fixed Effects (Cross)				
_KABAGAM—C	1005615.			
_KABDHARMASRAYA—C	-1403169.			
_KABPASAMANBARAT—C	1303024.			
_KABSOLOKSELATAN—C	-3146125.			
_KABLIMAPULUHKOTA—C	1634057.			
_KABSOLOK—C	-740650.9			
_KABPASAMAN—C	2059270.			
_KABPADANGPARIAMAN—C	-1320125.			
_KABSIJUNJUNG—C	1122211.			
_KABTANAHDATAR--C	908900.4			
_KABPESISIRSELATAN--C	-1812739.			
_KABKEPULAUANMENTAWAI--C	-2783466.			
_KOTAPAYAKUMBUH--C	-1108282.			
_KOTAPADANG—C	8127273.			
_KOTABUKITTINGGI—C	451091.6			
_KOTASOLOK—C	-109038.7			
_KOTAPADANGPANJANG—C	-2382797.			
_KOTAPARIAMAN--C	563310.9			
_KOTASAWAHLUNTO—C	-2368360.			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.964486	Mean dependent var	7890356.	
Adjusted R-squared	0.954270	S.D. dependent var	2344250.	

S.E. of regression	501310.5	Akaike info criterion	29.28758
Sum squared resid	1.83E+13	Schwarz criterion	29.87900
Log likelihood	-1369.160	Hannan-Quinn criter.	29.52656
F-statistic	94.40577	Durbin-Watson stat	1.950202
Prob(F-statistic)	0.000000		

1. Pengujian Hipotesis

Hasil penelitian memperlihatkan keberartian setiap variabel bebas terhadap variabel terikat maka dilakukan uji hipotesis seperti berikut ini.

a) Uji F (Simultan)

Uji F atau uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} \geq -F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat secara bersama-sama. Sebaliknya jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} < -F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil estimasi regresi panel pada tabel IV.9, dapat diketahui bahwa F_{hitung} yaitu 94,40 $> F_{tabel}$ yaitu 2,70. Untuk melihat pengaruh signifikannya yaitu dilihat dari Probabilitas F(Statistik) yaitu sebesar 0,000000 lebih kecil dari pada Alpha 0,05%. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara bersama-sama variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap Variable terikat yaitu pertumbuhan ekonomi.

b) Uji t (Parsial)

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai t hitung dengan t tabel, jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} \geq -t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sebaliknya jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

2. Hipotesis pertama

Hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berpengaruh Signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Dari hasil estimasi regresi panel pada tabel IV.9 dapat diketahui bahwa Nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , yaitu $2,8797 \geq 1,6605$ pada $\alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini diterima, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.

3. Hipotesis kedua

Hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi, dari hasil estimasi regresi panel di atas dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} besar dari nilai t_{tabel} yaitu $3,6066 \geq 1,6605$ pada $\alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga hipotesis alternatif yang diajukan dalam penelitian ini diterima, sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.

4. Hipotesis Ketiga

Hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hasil estimasi regresi panel di atas dapat diketahui bahwa nilai Nilai $-t_{hitung}$ lebih besar dari $-t_{tabel}$, yaitu $-0,3362 \geq -1,6605$ pada $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.

D. Penutup

Penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/Kota dan berhubungan positif. Artinya, setiap peningkatan yang terjadi Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan menyebabkan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi di kabupaten/Kota Sumatera Barat.

Selanjutnya, Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Sumatera Barat. Artinya, setiap peningkatan yang terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) maka akan menyebabkan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.

Sedangkan, Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan berhubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/Kota Sumatera Barat. Artinya, setiap peningkatan yang terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) maka akan menyebabkan menurunnya pengeluaran pemerintah di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.

Sehubungan dengan itu, penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah daerah di Sumatera Barat untuk mengeksplorasi sumber-sumber penerimaan/ pendapatan daerah dengan melakukan pencermatan terhadap pajak daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan lain yang belum dapat diwujudkan dan yang sudah jalan tetapi belum optimal agar pertumbuhan ekonomi daerah di Sumatera Barat dapat ditingkatkan.

Selain itu, pemerintah daerah di Sumatera Barat perlu menata penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) kearah kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan upaya memperbaiki perekonomian daerah. Sehingga perekonomian daerah dapat menjadi baik maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.

E. Daftar Pustaka

Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, Magister Sains Ilmu-ilmu Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Universitas Gadjah Mada Jogjakarta

Damador, Gujarati. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Erlangga

Evasanti, Triurlini. 2006. *Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Sebagai Sumber PAD Kota Batu*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Brawijaya, Malang.

Hirawan, S.B. 1993. *Pengembangan Pola Bantuan Daerah dalam Repelita VI : Pembangunan Jangka Panjang Tahap II*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia.

Iimi , Atsushi. 2004. *Decentralisation and Economic Growth Revisited : An Empirical Note*.

Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 *Tentang penganggaran asset tetap*.

Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 *Tentang pembagian DAU*.

Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 *Tentang penyusunan APBD.*

Prasetyono, Pipin. 2011. *Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (studi kasus seluruh kabupaten/kota di pulau jawa tahun 2001-2009).*

Presetya, Wawan. 2011. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/Kota Se-Jawa Bali Tahun 2006-2009)*

Umar, Husein. 2005. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Sihite, Friska. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera 2004-2007)*

Sugiono. (2003). *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.

Sumarsono, Hadi dan Sugeng Hadi Utomo. 2009. "Deliberate Inflation pada Kebijakan Desentralisasi Fiskal Jawa Timur dan Dampaknya bagi Pertumbuhan Daerah". *Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan*, Vol. 1, No. 3, h. 157-168.

Wandira, Arbie Gugus. 2013, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap pengalokasian belanja modal di Indonesia.* Universitas Negeri Semarang. Jurnal

Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.* Jakarta : PT Raja Grafindo

